



UIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

(Studi putusan PT Semarang Nomor : 276/PID.SUS/2020/PT SMG)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**ANDI UBAY
NPM : 171003742014763**

SEMARANG

2021/2022



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI.
(STUDI PUTUSAN PT SEMARANG NOMOR : 276/PID.SUS/2020/PT SMG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ANDI UBAY
171003742014763

Mengesahkan,
Tim Pengaji
Ketua
Soenarto, SH., M.Hum.
NIDN : 0614046101

Anggota,
Bambang Purwanto, SH., M.H.
NIDN : 0604036402

Anggota,
Dr. Sri Retno Widyorini, SH., M.Hum.
NIDN : 0628096301



SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	1
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. TINJAUAN TENTANG ABORSI	7
B. TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA	17
C. TINJAUAN TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. TIPE PENELITIAN	24
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	24
C. SUMBER DATA	25
D. METODE PENGUMPULAN DATA	26
E. METODE PENYAJIAN DATA.....	26

ABSTRAK

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup. Tindakan aborsi berupa penguguran dengan cara pembunuhan janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh, dan berkembang dan menjadi besar aborsi dilakukan yakni untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu aborsi juga sinonim dengan istilah penguguran keguguran atau kelahiran sebelum waktunya, Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada Pasal 299,346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi. Penelitian ini mengerucut pada dua rumusan masalah, yang pertama Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Undang-Undang, dan yang ke dua Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di PT Semarang Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT Semarang.

Penelitian ini memakai pendekatan adalah yuridis normatif. metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian ilmu hukum yang dikonsepsikan berdasarkan asas-asas, norma-norma, dogma-dokma serta kaidah hukum yang merupakan landasan dalam berperilaku. Teknik pengolahan data Bahan hukum telah didapatkan maka selanjutnya bahan hukum tersebut akan diidentifikasi dan dikelompokan secara sistematis sesuai pokok permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pokok masalah yang diangkat maka dapat di simpulkan Kedudukan anak dalam suatu Negara menjadi penting, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan ekstafet perjuangan bangsa dan Negara. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kasus aborsi. ATIKA RAHMAWATI alias ATIKA Binti PARJANA atas persetujuan dari KURNIAWAN SATRIA telah terbukti dalam melakukan tindakan penghilangan nyawa terhadap anak dengan kesengajaan,karena terbukti bersalah dalam melanggar pasal 346 KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Pindak Pidana Aborsi.